

Itjen Kemenag Perkuat Moderasi Beragama Guru dan Pengawas Madrasah

Cirebon (Kemenag) --- Kementerian Agama terus mengkampanyekan gerakan moderasi beragama. Beragam program dan kegiatan dilakukan, salah satunya yang dilakukan Itjen Kementerian Agama.

Bekerja sama dengan Setara Institute, Itjen menggelar penguatan pemahaman moderasi beragama. Kegiatan ini diikuti para kepala madrasah, pengawas, dan guru mata pelajaran agama di madrasah se-Kabupaten/Kota Cirebon.

Bertajuk "Pencegahan dan Penanganan Radikalisme bagi Kepala Madrasah, Pengawas, dan Guru Madrasah", kegiatan ini dibuka Sekretaris Itjen Kemenag Muhammad Tambrin. "Kementerian Agama secara kelembagaan mempunyai komitmen sebagai garda terdepan moderasi beragama, dan mencegah paham radikal di tanah air. Tutup rapat celah radikalisme dan juga tindakan korupsi," ujar M Tambrin di Cirebon, Senin (13/01).

"Madrasah sebagai ujung tombak pendidikan karakter generasi muda, hendaknya lebih intens mengkampanyekan moderasi beragama," sambungnya.

Menurut Tambrin, konsentrasi terbesar ASN Kemenag ada di madrasah. Oleh sebab itu, penting memitigasi potensi-potensi adanya ASN Kemenag yang terpapar radikalisme.

Senada dengan Sekretaris Itjen, Direktur Setara Institute, Ismail Hasani menjelaskan, kegiatan ini bertujuan agar Kepala Madrasah, Pengawas, dan para guru memahami arti penting moderasi beragama. Penguatan pemahaman ini menjadi bagian dari upaya Kemenag dalam pencegahan tindakan intoleransi dan radikalisme, khususnya di lingkungan madrasah.

"Di pelatihan ini, peserta akan dibekali wawasan terkait kebhinekaan, moderasi beragama, dan Islam yang rahmatan lil 'alamin oleh para fasilitator yang di antaranya terdiri dari auditor," jelas Ismail.

"Beberapa tahun belakangan virus konservatisme dan pendangkalan berfikir cukup masif terjadi. Hal ini perlu kitaantisipasi, di antaranya dengan pelatihan yang melibatkan pihak madrasah," pungkasnya.

SETARA Institute for Democracy and Peace adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia. (Taufiqurrohman Hs)

Sumber : Itjen Kemenag

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512564/itjen-kemenag-perkuat-moderasi-beragama-guru-dan-pengawas-madrasah>



Bertemu Imam Masjid Dubai, Menag: Jaga Nama Baik Indonesia

Dubai (Kemenag) --- Menteri Agama Fachrul Razi bertemu dengan warga negara Indonesia yang tengah bertugas sebagai imam masjid di Dubai. Pertemuan yang diinisiasi KJRI Dubai, sehari setelah Menag mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Shaikh Muhammed Ben Zayed (MBZ) di Istana Kepresidenan Qasr al-Wathan, Abu Dhabi.

Hadir mendampingi Menag, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan Kasi Kasi Pengembangan Regulasi dan Metode Dakwah, Direktorat Penerangan Agama Islam Subhan Nur. Dari pihak KJRI Dubai, ada Pensosbud Yunita beserta jajarannya. Sementara tiga imam masjid yang berasal dari Indonesia adalah Harir Ridwan, M. Munir, dan Andy. Mereka hadir dengan istri dan anak-anaknya.

“Jalankan tugas dengan baik karena itu adalah amanah. Kenalkan corak keberislaman di Indonesia kepada dunia,” pesan Menag di Dubai, Senin (13/01) malam.

“Jaga nama baik bangsa Indonesia,” lanjutnya

Menag juga berpesan agar para imam bisa menampilkan Islam yang ramah dan toleran. Sebab, Uni Emirat Arab termasuk negara dengan tingkat tasamuh yang tinggi. “Islam di sini terlihat indah dengan keramahan warga UEA dan jaminan rasa aman,” tuturnya.

Menag mengaku senang mendengar kisah tentang kinerja baik para imam, termasuk tentang kemampuan mereka berkhotbah, baik dalam Bahasa Arab maupun Inggris. “Kami akan terus tingkatkan sinergi. Insya Allah ke depan akan kami kirimkan kembali 100 imam,” tandasnya.

Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjalin kerjasama dalam urusan agama Islam dan wakaf. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohammed bin Matar al Kaabi. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Joko Widodo bertemu Shaikh Muhammed Ben Zayed (MBZ).

Sumber : KJRI Dubai

Penulis : Thobib Al-Asyhar

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512565/bertemu-imam-masjid-dubai--menag--jaga-nama-baik-indonesia>



Audiensi Kemenag, Sapuhi Bahas Vaksin dan Pajak Umrah

Jakarta (Kemenag) --- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menerima audiensi Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kementerian Agama. Kehadiran Sapuhi diterima Dirjen PHU Nizar, didampingi Diektur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim.

Pengurus Sapuhi Riza Pahlevi menyampaikan masalah pembatasan pendaftaran vaksin secara online oleh Kemenkes. Sapuhi juga menemui adanya perbedaan data jemaah yang terekam di barcode vaksin dengan data yang ada di buku.

“Ini yang terjadi di lapangan. Kami tidak mau ada kegagalan keberangkatan lalu Kementerian Agama menjadi sorotan karena tidak melakukan pembinaan ataupun penyelenggaraan dengan baik. Ini yang kami khawatirkan,” terang Riza di Jakarta, Selasa (14/01).

Selain vaksin, Sapuhi juga menyampaikan adanya biaya asuransi ganda yang harus dibayar jemaah. Sebab, mulai 1 Januari 2020, Arab Saudi memberlakukan asuransi senilai 189 SAR. Sementara jemaah juga sudah mendapatkan asuransi dari Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU) senilai Rp50.000.

“Masih adanya double asuransi, ini yang memberatkan mereka (jemaah umrah dan haji khusus), karena per 1 Januari kemarin sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Riza juga berharap moratorium izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) segera dicabut. Menurutnya, beberapa anggota Sapuhi sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan izin baru. Sapuhi sendiri kini mempunyai 214 anggota.

Terkait pembatasan pendaftaran vaksin secara online, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim akan berkoordinasi dengan pihak Kemenkes, tepatnya dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Pusat Kesehatan Haji. “Ini nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Puskeshaji termasuk juga KKP. Karena kami juga sudah pernah komunikasi. Informasinya begitu mereka membatasi pendaftaran secara online. Jadi kalau sudah lewat satu hari kemudian dijatahkan hanya 20 vaksin/hari, ya sudah tutup untuk besok lagi,” terang Arfi.

Arfi menambahkan, Ditjen PHU akan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak terkait penghapusan pajak 1% untuk para penyelenggara perjalanan yang terkait dengan ibadah dan keagamaan. Pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan Ditjen Pajak. “Intinya mereka setuju dengan penghapusan (pajak) ini, tapi kita tinggal tunggu regulasinya saja,” kata Arfi.

Sumber : -

Penulis : Husni Anggoro

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512566/audiensi-kemenag--sapuhi-bahas-vaksin-dan-pajak-umrah>



Kemenag Akan Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Jakarta (Kemenag) --- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag tengah mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan moratorium izin pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan menghentikan pembukaan izin pendaftaran PPIU sudah berlangsung sejak April 2018 dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang moratorium izin PPIU baru.

Dirjen PHU Nizar mengatakan, proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem online yang tengah difinalisasi. Sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat dan prosesnya lebih terbuka.

“Moratorium kita targetnya tanggal Akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini di lontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari,” tegas Nizar saat menerima pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kemenag Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (14/01). Hadir juga, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim serta jajaran eselon III dan IV Ditbina Umrah dan Haji Khusus.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jemaah umrah.

Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6miliar.

Pengawasan dan pembinaan di lapangan yang dilakukan Tim Satgas Umrah mendapat apresiasi dari Sapuhi. Pengurus Sapuhi, Riza Pahlevi mengaku telah mengultimatum anggotanya agar menghentikan penjualan paket umrahnya jika sampai 31 Januari belum melakukan proses izin menjadi cabang dari travel utamanya.

“Kemarin sudah ada sidak. Kami sudah dapat informasinya, salah satunya adalah anggota kami. Setelah Undang-Undang dan Kep Dirjen keluar, kita langsung edukasi semua anggota kita untuk taat aturan. Setelah hasil sidak, kita keluarkan ultimatum per 31 Januari itu tidak boleh semuanya jualan umrah,” tegasnya.

Sumber : -

Penulis : Husni Anggoro

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512567/kemenag-akan-cabut-moratorium-izin-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah>

Hak Kekayaan Intelektual PTKI Terus Meningkat

Jakarta (Kemenag) --- Grafik produktivitas civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan.

Sesditjen Pendidikan Islam Imam Safei menilai hal ini sebagai bagian indikator peningkatan mutu PTKI. "Sebuah universitas atau perguruan tinggi akan semakin diakui mutu dan kualitasnya, salah satunya karena jumlah hak kekayaan intelektual (HKI)nya berjumlah tak terhitung, terutama hak paten," ujar Imam Safei saat menerima laporan awal tahun Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (15/01). Laporan tersebut antara lain memuat perolehan HKI hingga awal tahun 2020.

Menurut Imam, tantangan global PTKI saat ini jauh lebih kompleks, mulai sarana, ekstrimisme, hingga mutu keilmuan. "Karena itu kebijakan kami untuk peningkatan HKI harus sejalan dengan konsep moderasi beragama sesuai outputnya," tuturnya.

Sebelumnya, Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Suwendi, melaporkan bahwa jumlah sertifikat HKI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mengalami peningkatan signifikan. Jika di awal tahun 2019 baru sebanyak 1.637 sertifikat, pada Januari 2020 ini, sertifikat HKI sudah mencapai 7.198 buah.

"Perinciannya, sebanyak 3669 dari UIN, 3077 dari IAIN, 59 dari STAIN, dan 393 dari PTKIS. Jumlah ini akan terus bertambah, sebab data ini masih terus bergerak, terutama dari PTKIS," jelasnya.

"Kita sangat bersyukur dengan capaian sekarang. Ini sungguh menggembirakan. Kita berharap perhatian dan pengurusan HKI terus ditingkatkan," lanjutnya.

Kepala Seksi Penelitian dan Pengelolaan HKI Makhrus berharap, selain sertifikasi HKI, PTKI juga lebih serius dalam peningkatan jumlah hak paten. Pengurusan paten jauh lebih rumit dan lebih panjang proses dari sekedar sertifikasi. Untuk itu, PTKI perlu lebih fokus dan serius mengurus hal tersebut.

"Tahun 2020, insya Allah sudah ada klaster khusus penelitian yang outputnya paten. Secara teknis pengurusannya melalui sentra HKI di kampus atau langsung secara online ke www.kemenkumham.go.id. Ada persyaratan tertulis dan sedikit berkas yang harus dipenuhi," jelasnya.

"Urgensi dan sosialisasi pendataan HKI hingga awal tahun 2020 ini dapat menjadi pintu masuk program prioritas setiap PTKI," tutupnya. (ME-Naim)

Sumber : Diktis

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512568/hak-kekayaan-intelektual-ptki-terus-meningkat>



Menjaga Kerukunan, Mewaspada Disharmoni Informasi

Beberapa waktu yang lalu, terutama dalam konteks kontestasi pemilu, *hoax* (ujaran kebencian) begitu banyak muncul. Keberadaannya menandai sisi gelap demokrasi. Orang merasa bebas untuk mengeluarkan pendapat dan menyebarkan berita bohong demi kepentingan sektoral tanpa mempertimbangkan adem dan rukunnya publik. Akibatnya, *hoax* menjadi efektif dalam upaya menajamkan konflik masyarakat dan mendorong keterbelahan.

Pada penghujung tahun 2019, sebagaimana dikutip berbagai media nasional, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa seturut perkembangan politik akomodatif yang dijalankan, *hoax* turun 80 persen. Data ini tentu patut disyukuri.

Namun demikian, sisa 20 persen *hoax* itu tetap punya potensi yang memiliki daya rusak yang sangat merugikan. Di samping itu, ujaran kebencian rasanya akan tetap menjadi “hantu” harmoni masyarakat karena beberapa hal.

Pertama, ujaran kebencian menjadi bagian dari sisi psikologi sosial. Di tengah mood sosial yang suka dengan budaya tutur dan *ghibah*, ujaran kebencian mudah tersemaikan. *Ghibah*, bergosip itu, lebih mengedepankan sensasi dan meminggirkan fakta sesungguhnya.

Kedua, ujaran kebencian cenderung menjadi bagian dari pemeran kontestasi politik. Dari data lembaga pemantau aktifitas online *drone empirit* (2019) secara statistik terlihat betapa masif dan aktifnya persebaran *hoax* selama Pemilu tempo hari. Dalam konteks ini, beberapa bulan lagi kontestasi pilukada akan serentak dilakukan di berbagai wilayah di tanah air. Mewaspada kemunculan *hoax*, dengan belajar dan mengambil hikmah dari kontestasi politik yang telah berlangsung, menjadi penting dan mendesak dilakukan bersama.

Klaus Schwab dalam *The Fourth Industrial Revolution* menggambarkan bahwa pada era sekaranglah manusia menghadapi perubahan yang demikian masif di semua bidang, terutama dalam dunia industri. Perubahan di sektor ini diikuti dengan perubahan di bidang kemasyarakatan yang ditandai dengan berubahnya cara berelasi antarindividu, bekerja, berkomunikasi, hingga bereksperesi dan berpolitik. Dukungan teknologi yang demikian masif menjadikan perkembangan budaya demikian pesat dan tidak terprediksi sebelumnya. Ide Schwab tentang Revolusi Industri 4.0 dipandang mampu menandai dengan tepat bagaimana pendulum sejarah peradaban bergerak.

Orang bilang bahwa sekarang adalah zaman yang serba terkoneksi secara digital. Dalam artikulasi kekinian, Thomas Friedman dalam *Thank You For Being Late* menunjukkan bahwa masyarakat hidup dalam aliran perdagangan global dan ikatan erat jejaring sosial yang tidak hanya sangat terkoneksi (*hyperconnected*) namun juga tergantung satu sama lain. Dalam relasi seperti ini, sekelompok masyarakat bisa saja dan sangat mungkin mengalami kondisi rentan terkena dampak tindakan seseorang yang dilakukan orang di belahan dunia lain.

Dalam konteks berkembangnya informasi, jauh sebelumnya Marshall McLuhan sudah memprediksi hal ini. Pandangan McLuhan sangat visioner dalam menilai perkembangan informasi. Tahun 1960an, 20 tahun sebelum internet ditemukan, McLuhan sudah mengatakan bahwa pelan tapi pasti dunia akan berkembang menjadi *global village*, menjadi desa global. Berbeda dengan perkotaan yang lebih kompleks jejaring infrastruktur dan konektivitasnya, sebuah desa terbentuk dan terbangun dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang memungkinkan penduduknya untuk saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Dalam kaitan globalitas kebersamaan ini, McLuhan juga memberi gambaran yang menarik tentang makna media dan pesan.

Dalam *The Medium is The Massage*, McLuhan seperti menyadari bahwa ada makna yang berkelindan antara *massage*, *message*, dan "*mass age*". Haidar Bagir (2019) melihat bahwa McLuhan telah dengan sadar membuat hubungan tripartit ini sebagai kondisi dimana informasi telah dikemas dengan suatu cara yang demikian memikat orang. Dalam sebuah konsep kesatuan, pesan (*message*) telah menyihir (*me-massage*) orang yang bisa saja melahirkan zaman yang penuh kekacauan (*mess age*).

Teks ini kemungkinan tertulis *The Medium is the Message*, bukan *The Medium is the Massage*. *Massage*, *message*, dan "*mess age*" menjadi penanda sekaligus peringatan McLuhan bahwa informasi dengan aneka bentuk dan pengaruhnya bisa menjadi pihak yang membawa kesejukan, menumbuhkan kedamaian dan menyumbang perkembangan peradaban, tapi juga bisa memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap peradaban itu sendiri melalui rupa-rupa bentuk dan pengaruh negatifnya.

Media online, mesin pencari informasi, dan messaging sebagai sarana pencarian dan penyebaran informasi menjadi semacam kelindan yang efektif bagi publik untuk merayakan apapun yang menjadi perhatian masyarakat. Google, misalnya, telah menjadi perangkat yang sedemikian rupa berkembang mengikuti apapun kecenderungan dan kebutuhan kita sebagai manusia.

Meruyaknya kemampuan google untuk mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan manusia bisa jadi tidak disadari oleh manusia sebagai penggagasnya. Dengan dukungan algoritma *artificial intelligent* (AI) dan masifitas big data yang diolah sedemikian rupa menjadikan manusia sebagai pihak yang selalu terawasi dan "dikelola" oleh mesin temuannya sendiri.

Di sisi lain membuncahnya informasi mengantarkan orang pada kebingungan untuk memilah dan memilih informasi yang diperlukan. Dalam kondisi demikian, banyak orang, tanpa keahlian, seringkali disertai dengan niat buruk, menjadi korban ataupun malah pelaku dari kekacauan atau kesimpangsiuran (*mess*) informasi. Kesimpangsiuran menjadi mungkin karena derasnya informasi yang ada disertai kepentingan personal dan atau institusi dikemas sedemikian rupa menjadi sarana yang mewarnai keseharian publik.

Publik seperti berlomba untuk menjadi yang pertama dalamewartakan isu-isu penting, entah komentar mengenai kehidupan politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Orang mengenalnya kemudian, di antaranya, sebagai *broadcast* atau informasi semacamnya yang disebarakan melalui berbagai sarana media sosial.

Keinginan untuk menjadi yang pertama, menjadi yang fungsional dan punya peran dalam informasi dan proses mewartakannya seringkali menemui ranah hukum karena tanpa disertai dengan kualitas pemahaman yang memadai terhadap informasi yang dihadapi, keahlian, dan kejujuran serta tanpa upaya *check and recheck*. Berkembanglah kemudian apa yang akrab dikenal sebagai *hoax* (berita bohong dan fitnah), *hate speech* (ujaran kebencian) dan juga *religious hate speech* (ujaran kebencian keberagamaan). Sarana untuk berkembang dan penyebarannya sejauh ini diantaranya adalah media sosial facebook, twitter, instagram, dan sarana messaging seperti whatsapp, telegram, signal, tam-tam, dan lainnya.

Sebaran dan intensitas untuk terlibat dan terhubung secara online, dan pada tingkat tertentu menjadi korban dan atau produsen *hoax*, *hate speech*, dan *religious hate speech* terlihat setidaknya dari dua latar utama, yakni latar teknis dan latar sosial budaya (psikologi prasangka) masyarakat Indonesia.

Pertama, secara teknis, intensitas masyarakat Indonesia untuk terus terhubung secara online terlihat dari data yang dikeluarkan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet di Indonesia). APJII pada tahun 2016 mengeluarkan data mengenai populasi pengguna internet. Dalam data tersebut APJII mencatat bahwa pengguna internet pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta dari 256,2 juta penduduk keseluruhan. Itu artinya separuh lebih masyarakat Indonesia telah terkoneksi dengan internet. Bisa dibayangkan bagaimana intensitas komunikasi online masyarakat Indonesia dengan data tingkat penggunaan seperti itu.

Kedua, secara sosial budaya masyarakat Indonesia sangat mudah memiliki prasangka negatif sebagaimana yang ditunjukkan Prof Sarlito Wirawan dalam penelitiannya. Melalui penelitian mengenai psikologi prasangka orang Indonesia, Sarlito menyimpulkan masyarakat Indonesia mudah memberikan penilaian sekilas tanpa mendalami dahulu. Dengan mendasarkan diri pada, diantaranya, rujukan dan teori prasangka yang berasal oleh Nelson (2002), Sarlito menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia mudah memberikan penilaian berdasarkan prasangka dalam hal politik, sosial, ekonomi, agama, dan ras.

Prasangka di sini merujuk pada suatu evaluasi negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain, semata-mata karena orang atau pihak lain tersebut merupakan anggota kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya sendiri. Lebih jauh Nelson melihat bahwa prasangka merupakan persepsi yang bias karena hanya didasarkan pada informasi yang salah atau tidak lengkap maupun hanya hasil imajinasi belaka. Inilah letak bahaya prasangka yang dalam literatur Islam dikenal sebagai fitnah. Jika persepsi imajiner diletakkan, dipahami, disebarkan, dan lebih jauh didesakkan sebagai fakta, maka di sinilah situasi dan kondisi *mess* (kekacauan) itu berlangsung.

Prasangka lebih sering berupa tampilan wajah kebenaran yang tidak pernah terdeteksi dan terukur, semacam kondisi "*facing the faceless*", menghadapi yang tak bermuka, meminjam istilah yang dipakai oleh Peter Verbezen. Prasangka adalah wajah kebenaran yang dimanipulasi oleh keinginan sesaat dan ambisi. Temuan Sarlito Wirawan memperkuat hal ini. Sarlito melihat masyarakat Indonesia kuat dipengaruhi setidaknya oleh prasangka etnis dan agama.

Dalam konteks psikologi prasangka ini, kebenaran bukan lagi menjadi acuan. Yang lebih mengemuka adalah *stereotype*/penggeneralisasian atau *gebyah uyah* dalam bahasa Jawa. Sarlito menilai bahwa *stereotype* berjalan dengan pola penggeneralisasian orang berdasarkan kategori kelompok tertentu. Prasangka yang berbentuk *stereotype* dapat memiliki dua sumber, yakni sumber sosial dan sumber kognitif.

Dalam hal sumber sosial, dimungkinkan tumbuhnya *in group* (perasaan sebagai sesama anggota dalam sebuah kelompok) dan *out group feeling*. Mereka yang memenuhi anggapan sebagai yang bukan menjadi anggota kelompok adalah mereka yang tidak patut mendapat penghargaan sebagaimana anggota-anggota dalam kelompok. *In group feeling* menjadikan mereka yang di luar adalah mereka yang layak dimusuhi.

Dalam konteks Islam, *in group* dan *out group feeling* ini juga menjadi perhatian tersendiri. Alquran menjelaskan: "Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata "Tuhanku telah menghinakanku" (al-Fajr 15-16)." Jika diberi kesenangan, manusia akan menjadikan Tuhan sebagai bagian dari dirinya, dan jika Tuhan sedang membatasi rezekinya, maka Tuhan dipahami sebagai pihak yang tidak ada dalam dirinya, bahkan menghinakannya.

Pada konteks ini terdapat relevansi dengan gagasan relasi asimetris Martin Buber. Dengan tidak menjadikan pihak luar memiliki kemungkinan memasuki kelompok yang dimiliki karena tiadanya penghargaan sosial, maka relasi yang terjadi adalah asimetris, relasi yang tidak manusiawi. Relasi yang manusiawi adalah relasi yang terjadi ketika sikap diri dan kehendak bersama memberi kemungkinan dan membiarkan perjumpaan antarmanusia itu untuk saling menerima dan menghargai perbedaan.

Titik penting dalam ide ini adalah mengenai perlunya saling menerima dan menghargai perbedaan sebagai fitrah kehidupan. Adalah sebuah nilai abadi dan hakiki kemanusiaan, bahwa harmoni merupakan nilai mendasar untuk terciptanya hubungan antarmanusia yang sesungguhnya. Sikap harmonis akan meminimalisir sikap yang mengedepankan prasangka yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak menyenangkan bagi orang atau pihak lain atau anti terhadap orang atau kelompok lain. *Wallahu a'lam*

Saiful Maarif
(Bekerja pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag)

Sumber : Saiful Maarif

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512569/menjaga-kerukunan--mewaspada-disharmoni-informasi-->

Sertifikasi Halal Gratis Masih Sulitkan UMKM

● DEDY DARMAWAN NASUTION
IIT SEPTYANINGSIH
ADINDA PRYANKA

Proses sertifikasi halal diminta tidak berbelit dan tidak mahal.

JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui, pengurusan sertifikasi halal untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih sulit. Sekalipun sertifikasi digratiskan, proses administrasi hingga mendapatkan sertifikat halal, ia nilai, masih sulit.

"Memang, sertifikat halal itu mempersulit kegiatan usaha UMKM. Dari segi biaya memang gratis untuk yang omzetnya di bawah Rp 1 miliar. Tapi, prosedurnya masih berbelit dan waktunya lama," kata Teten di Jakarta, Selasa (14/1).

Teten mengatakan, baik LPPOM MUI maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memproses pengurusan sertifikasi halal dinilai masih cukup berbelit. Dengan kata lain, UMKM tidak akan terbantu jika sekadar menggratiskan biayanya, tapi harus didukung dengan kemudahan perizinan.

"Harus dipermudah, jangan dipersulit untuk penyediaan sertifikat halal," kata Teten.

Kendati demikian, Teten tidak menjelaskan lebih lanjut di mana titik kesulitan UMKM yang mengajukan diri untuk melakukan sertifikasi halal produknya. Teten menegaskan, Kemenkop UKM bersama kementerian dan lembaga terkait terus menjalin sinergi untuk memudahkan sertifikasi halal bagi UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah sepakat untuk memberikan sertifikasi halal secara gratis bagi usaha kelas mikro dan kecil. Tetapi, pemerintah masih harus membahas lebih lanjut sumber dana pengganti biaya sertifikasi berikut skema subsidi yang akan disiapkan.

Inisiator dan Ketua Dewan Pembina Santripreneur Indonesia KH Ahmad Sugeng Utomo mendukung rencana pemerintah untuk menggratiskan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Sebab, selama ini, sertifikasi tersebut menjadi salah satu kendala bagi wirausaha.

Kendala tentu ada karena sertifikasi halal tergantung produk masing-masing. Pakaian, misalnya, harus tes laboratorium agar keluar sertifikat halal. Karena itu, santripreneur berharap, semua dibuat mudah.

"Kami harap, proses pengajuan sertifikasi halal tidak bertele-tele. Selain juga diharapkan tidak menghabiskan banyak biaya," kata pria yang kerap disapa Gus Ut itu kepada *Republika* usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM di Jakarta, Senin (13/1).

Harapan itu, lanjut Gus Ut, sudah disampaikan langsung ke Menteri UKM Teten Masduki. "Kalau Pak Menteri bilang akan mengusahakan itu lewat *Omnibus Law*," ujar Gus Ut.

Gus Ut sangat berharap pemerintah mempermudah anggota santripreneur dalam mendapatkan berbagai sertifikat produk, terutama sertifikat halal. Karena, jika tidak, hal itu dapat menjadi hambatan berat bagi UMKM untuk meningkatkan skala bisnis.

Direktur Operasi 2 Surveyor Indonesia Darwin Abas mengatakan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi produk halal adalah pelaksanaan sertifikasi halalnya sendiri. Sebab, sampai saat ini, surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tarif layanan sertifikasi halal belum terbit.

Darwin mengakui, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal menghadapi banyak tantangan. Di antaranya, ketersediaan LPH. "BPJPH harus segera menyiapkan banyak lembaga pemeriksa halal (LPH) yang memiliki

syarat minimal tiga auditor halal, memiliki laboratorium halal, atau kerja sama dengan laboratorium halal yang telah terakreditasi," kata Darwin kepada *Republika*, kemarin.

Surveyor Indonesia segera mendaftarkan diri untuk menjadi LPH ke BPJPH pada akhir tahun ini. Hal tersebut dalam rangka membantu pemerintah khususnya dan kepastian produk halal bagi konsumen Muslim pada umumnya.

Wapres KH Ma'ruf Amin juga telah memanggil para pejabat terkait untuk meminta penjelasan atas perkembangan implementasi jaminan produk halal, pekan lalu. Wapres meminta agar biaya dan prosedur sertifikasi halal bagi UMK dimudahkan.

Pemerintah, saat ini, masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal jika UMK digratiskan. Kiai Ma'ruf pun belum dapat memastikan apakah opsi subsidi dari ABPN maupun subsidi silang dari usaha besar.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, subsidi silang untuk gratiskan sertifikasi halal pelaku UMK tidak mungkin dilakukan. "Memangnya swasta itu negara? Ini kan kewajiban negara," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi *Republika*.

■ ed: fuji pratiwi

IK DMI Siapkan Khatib Bersertifikat

● FAUZIAH MURSID

Khatib diharapkan memiliki komitmen kebangsaan dan keumatan.

JAKARTA — Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia (IK DMI) sedang menyiapkan program dan sistem untuk melahirkan khatib bersertifikat. Tujuannya, agar ada ukuran standar untuk para khatib.

"Insya Allah semua (khatib) seperti itu (bersertifikat). Jadi, ke depannya, ada standar untuk memudahkan itu khatib bersertifikat," kata Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat (MPP) IK DMI Hamdan Rasyid di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/1).

Lebih lanjut, Hamdan menerangkan, ada sejumlah ukuran yang harus dipenuhi dalam sistem khatib bersertifikat. Misalnya, secara fikih, yakni rukun-rukun khutbah, bacaan Alquran harus fasih, dan materi dakwah yang disampaikan harus memberi pencerahan kepada masyarakat.

"Tidak sekadar ceramah biasa saja, ada spesifikasi khatib ini, jadi

beda dengan dakwah biasa. Dia menuntut rukun-rukun tertentu dan itu perlu kompetensi," ujar Hamdan.

Ia berharap, sistem khatib bersertifikat akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada khatib.

"Tentu pengaruhnya kalau yang bersertifikat *kan* betul-betul menguasai, jadi tidak ragu lagi kita. Sama dengan halal dan tidak halal, kalau sudah ada sertifikasi halal, kita *nggak* ragu lagi *kan*, sehingga dia layak tampil," ujar Hamdan.

Wakil Ketua Umum MPP IK DMI Munawar Fuad menambahkan, nantinya, IK DMI akan bekerja sama dengan ormas Islam dan masjid kampus se-Indonesia. Tujuannya, agar khatib bersertifikat tersebut tersosialisasi kepada semua khatib.

"Ikatan Khatib Indonesia akan bekerja sama dengan MUI, NU, Muhammadiyah, termasuk masjid kampus se-Indonesia," kata Munawar.

Selain ormas dan masjid kampus, IK DMI juga akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, DMI Pusat, universitas, serta pesantren.

Khatib, menurut dia, diharapkan mempunyai satu spirit yang sama dengan apa yang tengah

dihadapi bangsa. Karena itu, penting bagi seorang khatib untuk memiliki komitmen kebangsaan.

Dalam khutbahnya, lanjut Munawar, khatib diharapkan tidak mengangkat tema yang berpotensi meresahkan masyarakat. Karena itulah, IK DMI merasa perlu memberlakukan sistem dan mekanisme khatib bersertifikat.

"Karena ini adalah profesi. Kami adalah lembaga profesi, maka Ikatan Khatib DMI akan memberlakukan sistem dan mekanisme khatib bersertifikat, bukan sertifikasi khatib," ujar Munawar.

Pada Selasa (14/1) Majelis Pimpinan Pusat (MPP) IK DMI bersilaturahmi kepada Wapres KH Ma'ruf Amin di kantornya. Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan, khutbah Jumat merupakan ibadah yang bersifat rukun, yakni keharusan yang menentukan sah atau tidaknya kewajiban shalat Jumat.

Selain itu, khatib sangat berpengaruh terhadap jamaahnya dalam menyampaikan pesan keagamaan. "Karena itu, pesan dan isi khutbah harus benar-benar sesuai dengan syariah dan fikihnya," ujar Wapres.

Wapres juga menyampaikan pentingnya kualitas setiap khatib. Dalam hal ini, seorang khatib se-

harusnya mempunyai kompetensi yang mumpuni dan mendalam di bidang keagamaan, memiliki kefasihan dalam melafalkan dan memahami Alquran dan as-Sunnah, serta memiliki komitmen kebangsaan dan keumatan dengan membawa rahmat bagi semesta.

"Itulah pentingnya standar kualitas kompetensi yang akan memengaruhi keabsahan dan khususnya ibadah, sekaligus manfaat dan kemaslahatannya bagi jamaah masjid dan lingkungannya," kata Wapres dalam pesan tertulis.

Terkait arahan Wapres, Wakil Ketua Umum MPP IK DMI Munawar Fuad mengatakan, Wapres juga meminta para khatib mengangkat tema arus baru ekonomi syariah dalam khutbahnya. Wapres ingin arus baru ekonomi syariah digaungkan ke seluruh penjuru Tanah Air untuk menggali potensi besar ekonomi syariah yang belum tergarap maksimal di Indonesia.

"Jadi inilah yang mau digalang melalui industri syariah, ekonomi syariah, dan bisnis syariah supaya menjadi tema utama, bukan tema-tema yang mengadu domba yang membuat perpecahan dan membuat umat resah dengan ketidakpahaman dan kesalahpahaman."

■ ed: wachidah handasah

Sertifikat Halal Khusus UKM Rp0

Agar Ekonomi Rakyat Terus Bergerak

JAKARTA-Pemerintah berencana menggratiskan kepengurusan sertifikat halal untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki meminta agar prosedur pembuatan sertifikat halal dipermudah.

"Khusus untuk sertifikat halal sudah ada keinginan untuk digratiskan bagi UKM dengan omzet Rp1 miliar ke bawah. Itu banyak menolong, tapi harus ada penyederhanaan prosedur," kata Teten ditemui usai rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (14/1).

Menurut Teten, gratisnya kepengurusan sertifikat halal untuk UKM dapat membantu pelaku usaha di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendaftarkan jumlah usaha mikro dan kecil yang akan mendapatkan fasilitas gratis tersebut.

Teten menambahkan, dengan penyederhanaan prosedur, maka usaha menengah dan besar juga dapat memperoleh sertifikat halal dengan mudah. Meskipun bagi mereka,

biaya bukan merupakan kendala bagi mereka. "Sebenarnya kalau usaha menengah dan besar tidak masalah dari segi biaya. Tapi tetap harus cepat," tegasnya.

Pemerintah berencana memberi insentif dengan menggratiskan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil. Pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Selain itu, proses administrasi hingga mendapatkan sertifikasi halal juga akan dipermudah. Adapun skema dan besaran anggaran subsidi anggaran yang diberikan pemerintah bakal bergantung pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan proses sertifikasi produk halal bagi usaha mikro kecil (UMK) tidak akan dipungut biaya atau gratis. "Kalau tarif dinolkan," janjinya, terpisah sebelumnya.

Selain tarif nol, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengungkapkan pemerintah akan mempermudah proses mulai registrasi hingga sertifikat halal berada di tangan pelaku usaha. Meski begitu, Sri Mulyani belum memberikan rincian anggaran yang

akan dikeluarkan untuk memberikan subsidi berupa tarif nol dalam mengurus sertifikasi produk halal itu.

Dia menyebut, estimasi anggaran untuk nol tarif itu akan dikalkulasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Namun, pelaksanaan untuk menjangkau sampai jutaan usaha kecil itu seperti apa, itu nanti dibahas," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengatakan ketentuan terkait tarif nol itu masih terus dibahas termasuk anggaran untuk subsidi tersebut. "Apakah dia subsidi dalam Badan Layanan Umum (BLU) atau kalau kurang nanti Kemenkeu bisa turun tangan. Pokoknya intinya bagaimana kami memfasilitasi usaha kecil menengah," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penerapan biaya Rp0 atau gratis untuk proses sertifikasi label halal bagi UKM akan segera diberlakukan untuk meningkatkan giat ekonomi di kalangan masyarakat. "Idenya memang untuk UKM, itu yang digratiskan. Semangatnya itu supaya mereka tidak terbebani, karena UKM ini banyak sekali. Jadi bagaimana caranya bisa tersertifikasi

(halal) tapi tidak membebani mereka, tapi juga tidak membebani negara," harapnya.

Wapres mengatakan, skema alokasi anggar-

an untuk pembebasan biaya sertifikasi UMK tersebut sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan. (ant)